

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di pedesaan. Upaya menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan.

Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan. Menyelesaikan masalah kemiskinan merupakan agenda pemerintah yang sangat penting dan relatif pelik. Kerumitan tersebut disebabkan oleh karena kemiskinan menyentuh pada banyak sektor. Dengan demikian pendekatan yang harus dilakukan juga harus bersifat multidimensional dengan memahami permasalahan secara mendasar (Sulistiyani, 2004:20).<sup>5</sup> Kondisi masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir diberbagai kawasan secara umum ditandai oleh adanya beberapa cirri, seperti kemiskinan, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) karena sebagian besar penduduknya hanya lulusan dari pendidikan dasar serta ada juga yang belum tamat sekolah dasar dan lemahnya fungsi dari keberadaan Kelompok Usaha

---

<sup>5</sup>Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004. *Kementrian dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.

Bersama (KUB), Lembaga Keuangan Mikro (LKM), atau kapasitas berorganisasi masyarakat. Hal-hal seperti ini merupakan hambatan potensial bagi masyarakat nelayan/pesisir untuk mendorong dinamika pembangunan di wilayahnya.

Upaya dalam membangun masyarakat nelayan yang kondisinya seperti di atas, dan agar potensi pembangunan masyarakat dapat dikelola dengan baik, maka salah satu strategi yang harus ditempuh adalah dengan membangun dan memperkuat kelembagaan sosial yang dimiliki atau yang ada pada masyarakat dan mengembangkan kualitas SDM, dengan jalan meningkatkan wawasan pembangunan dan keterampilan ekonomi masyarakat.

Diharapkan masyarakat secara kolektif memiliki kemampuan optimal dalam membangun wilayahnya (Kusnadi, 2007:2)<sup>3</sup>. Kegiatan pemberdayaan sosial-ekonomi sangat diperlukan agar masyarakat memiliki kemampuan dalam mengelola potensi sumber daya ekonomi lokal secara optimal dan berkelanjutan. Pengembangan dalam kemampuan sosial-ekonomi masyarakat, yang diperlukan untuk masa depan pembangunan agar mampu memanfaatkan peluang-peluang ekonomi yang ada sehingga masyarakat dituntut aktif dalam proses pembangunan lokal. Pembangunan manusia supaya mencapai kualitas diri yang meliputi wawasan dan pengetahuan, sikap mental, dan kecakapan keterampilan akan dikembangkan secara optimal untuk mencapai kemandirian. Kemandirian masyarakat yang terbentuk secara meluas sangat potensial untuk memberikan kontribusi berharga di dalam pengelolaan lingkungan, pemukiman, dan prasarana

---

<sup>3</sup>Kusnadi, 2007. *Strategi Hidup Masyarakat Nelayan*. Yogyakarta: Lkis

wilayah, sektor informal, sosial budaya, pendidikan yang merupakan sektor-sektor penting atau pengembangan wilayah sebagai bagian integral dari program-program pembangunan nasional Indonesia (Sulistiyani,2004:19)<sup>4</sup>.

Membangun masyarakat nelayan yang kondisinya seperti diatas dan agar potensi pembangunan masyarakat dapat dikelola dengan baik, maka salah satu strategi yang harus ditempuh adalah dengan memberikan alternative program pemberdayaan masyarakat khususnya menyangkut masyarakat nelayan tersebut. Program pemberdayaan masyarakat adalah program pelibatan dan peningkatan partisipasi masyarakat, program yang berbasis masyarakat karena sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka, program yang berasal dari bawah yang berarti bahwa masyarakatlah yang mengusulkannya, program yang bersifat advokasi karena peran dari orang luar hanya sebatas mendampingi dan memberikan alternatif pemecahan masalah kepada masyarakat.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) yang diluncurkan pada bulan April 2007 oleh Presiden RI adalah program nasional yang menjadi kerangka kebijakan dan acuan pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan tujuan PNPM Mandiri, mulai tahun 2009, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) menginisiasi program pemberdayaan yang merupakan integrasi program pemberdayaan pada masing-masing eselon satu dalam wadah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri - Kelautan dan Perikanan (PNPM

---

<sup>4</sup> Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media

MANDIRI - KP) yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil melalui Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Salah satu program pemberdayaan masyarakat untuk masyarakat nelayan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri - KP). PNPM Mandiri - KP diinisiasi oleh Departemen Kelautan dan Perikanan mulai tahun 2009 merupakan perwujudan dari komitmen nasional dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan.

Kegiatan PNPM Mandiri antara lain meliputi bidang pembudidaya ikan, penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran ikan, pengawasan sumber daya ikan, pengolahan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di sektor kelautan dan perikanan, diharapkan bisa menurunkan angka kemiskinan nelayan di Indonesia, sebab dengan program tersebut nelayan bisa mengembangkan usaha sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Melalui program PNPM Mandiri tersebut, diharapkan kemiskinan yang terjadi pada sekitar 32% dari 16,42 juta masyarakat pesisir dan nelayan dapat diatasi, melalui pengembangan kegiatan perekonomian masyarakat berbasis pada sumber daya lokal, baik masyarakatnya maupun sumber daya alamnya. Program PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan berjumlah Rp116 milyar, yang akan dialokasikan ke 120 kabupaten/kota\*.

---

\*Sumber : *Data-data dari Kantor Desa Huangobotu 2014*

Masing-masing kabupaten/kota mendapat sekitar Rp926 juta. Dana tersebut kemudian akan dialokasikan sebagai Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp517 juta masing-masing kabupaten/kota, sedang sisanya untuk dana sosialisasi, peningkatan kapasitas, termasuk pelatihan-pelatihan bagi masyarakat. Dalam pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tidak selalu mencerminkan distribusi pendapatan yang adil dan merata. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini hanya dapat dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat, seperti masyarakat perKabupaten, sedangkan masyarakat pesisir atau pinggiran mendapat porsi yang lebih kecil dan tertinggal.

Pendapatan juga akan memunculkan masalah karena adanya kesenjangan pembangunan antar sektor, terutama pada sektor perikanan (basis ekonomi pesisir) dan non ekonomi perikanan (ekonomi perKabupaten). Pada hakikatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat pesisir itu sendiri, tetapi juga dapat membangun kekuatan ekonomi Indonesia secara umum berdasarkan pada keunggulan yang dimiliki. Realitasnya, kehidupan masyarakat nelayan senantiasa dilanda kemiskinan, bahkan kehidupan nelayan sering diidentikkan dengan kemiskinan, tingkat kesejahteraan para pelaku perikanan (nelayan) pada saat ini masih dibawah sektor-sektor lain, termasuk sektor pertanian agraris. Nelayan (khususnya nelayan buruh dan nelayan tradisional) merupakan kelompok masyarakat yang dapat digolongkan sebagai lapisan sosial yang paling miskin diantara kelompok masyarakat lain di sektor pertanian.

Salah satu penerima program PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) pada tahun 2004 dan kemudian dilanjutkan pada tahun 2006 hingga 2008. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat bernisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam rangka untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri<sup>1</sup>. Masyarakat nelayan pengumpul atau bakul, adalah kelompok masyarakat pesisir yang bekerja disekitar tempat pendaratan dan pelelangan ikan. Mereka akan mengumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan baik melalui pelelangan maupun dari sisi ikan yang tidak terlelang yang selanjutnya dijual ke masyarakat sekitarnya atau dibawah ke pasar-pasar lokal.

Program-program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan baik itu PNPM-Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri), PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) serta beberapa program lain yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat pesisir. Program bantuan dana yang pemerintah lakukan kepada masyarakat pesisir, ini juga bisa membantu para masyarakat nelayan dipesisir terbebas dari belenggu kemiskinan. Oleh karena itu program ini ditujukan untuk mengurangi jumlah pengangguran dan memberikan kesempatan berusaha bagi para nelayan, maksudnya selain kelompok

---

<sup>1</sup> James A. Christenson & Jerry W. Robinson, Jr Ames, *Community Defelopment In Prespective*: Lowia State Univ<sup>2</sup>Sugeng, Budiharsono, *Analisis dan Formalisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*, (Bogor: Bahan Kuliah Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan), Hal 13 ersity Press 1989, Hal 215.

nelayan yang memiliki pendapatan, tetapi mereka juga harus mencari ketrampilan baru didalam merubah hidup yang susah (mencari pekerjaan sampingan selain bekerja sebagai nelayan), ini juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya bermuara pada pengentasan kemiskinan dan masyarakatnya pun bisa hidup dengan sejahtera di zaman yang serba canggih ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari data penelitian diatas yang menjelaskan mengenai latar belakang permasalahannya, Adapun yang menjadi persoalan dan permasalahan dalam data penelitian ini adalah : Bagaimanakah Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di kawasan pesisir pantai yang berada di Dusun Inengo, Kec. Kabila Bone, Kab. Bone Bolango ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitiannya adalah Untuk menganalisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dikawasan pesisir pantai Di Dusun Inengo Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun dengan melalui kegiatan penelitian, hal ini diharapkan agar bisa memperoleh beberapa manfaat yang berguna sekali bagi khalayak umum (masyarakat) yang diantaranya :

1. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah daerah untuk pengambilan kebijakan dalam rangka identifikasi kondisi sosial ekonomi bagi masyarakat pesisir di daerah Inengo dan sekitarnya.

2. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah daerah untuk pengambilan kebijakan dalam rangka menentukan usaha perikanan masyarakat Inengo dan sekitarnya yang diperkirakan potensial untuk dijadikan proyek pengembangan perikanan pada masyarakat Inengo dan sekitarnya.
3. Memberikan pengalaman baru dari hal-hal yang didapatkan dilokasi penelitian dan menambah ilmu pengetahuan yang baik bagi mahasiswa atau peneliti yang meneliti pemberdayaan masyarakat nelayan di dalam kehidupan masyarakat secara umumnya.